



**KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

Graha Mandiri, Jl. Imam Bonjol No. 61, Jakarta Pusat 10310

Email: humas@kemenkopangan.go.id

**SIARAN PERS
No.53/SES.M.PANGAN.4/SP/09/2025**

"PERCEPATAN OPERASIONAL KOPERASI DESA/KELURAHAN MERAH PUTIH UNTUK PERKUAT DISTRIBUSI BARANG POKOK DAN LAYANAN DESA"

Jakarta, 4 September 2025 – Kementerian Koordinator Bidang Pangan menyelenggarakan Rapat Koordinasi Operasional Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP) pada Kamis, 4 September 2025. Rapat ini dipimpin langsung oleh Menko Bidang Pangan dan turut dihadiri antara lain Menteri Koperasi Budi Arie Setiadi, Menteri Pemuda dan Olahraga Dito Ariotedjo, serta Direktur Utama Danantara Aset Manajemen Dony Oskaria, bersama jajaran wakil menteri, deputi, dan perwakilan lintas kementerian/lembaga terkait.

Membuka rapat, Menko Pangan menegaskan bahwa KDMP merupakan instrumen strategis untuk memperlancar distribusi barang pokok, minyak goreng, LPG, pupuk, hingga berbagai bantuan pemerintah. Ia menekankan bahwa hasil nyata dari operasional KDMP harus segera terlihat agar kepercayaan masyarakat dapat pulih.

Kementerian Koperasi melaporkan bahwa manual book pembagian wilayah kerja Himbara telah rampung, begitu pula pengoperasian apotek dan klinik desa. Sementara itu, Kementerian Keuangan melalui PMK terbaru yang menerbitkan aturan alokasi untuk penyaluran pinjaman kepada KDMP sepanjang tahun 2025, dengan jangka waktu pinjaman enam tahun dan bunga hasil investasi yang ringan. Empat bank Himbara telah ditetapkan sebagai penyalur pembiayaan dan bantuan. Danantara menginformasikan lebih dari 8.000 proposal usaha telah masuk, dengan prioritas pendanaan diberikan kepada unit yang sudah beroperasi secara fisik.

Di lapangan, perkembangan KDMP cukup bervariasi. Di Jawa Tengah dan Jawa Timur sudah terdapat 1.750 KDMP yang bergerak meskipun belum menerima pembiayaan. Wilayah 1 mencatat 2.116 KDMP beroperasi dari target 8.520 unit, sementara di wilayah 2 terdapat 5.800 KDMP yang sudah memiliki minimal satu gerai. Namun, wilayah 3 masih menghadapi tantangan besar dengan keterbatasan modal, di mana dari target 2.224 desa baru 36 KDMP yang beroperasi tersebar di Jakarta, Banten dan Sulawesi Selatan. Untuk wilayah 4, KDMP yang sudah operasional sebanyak 579 KDMP untuk wilayah Jawa Timur dan Bali.

Sinergi lintas kementerian dan lembaga menjadi kunci percepatan program ini. Kementerian Perdagangan akan menetapkan kewajiban alokasi minyak goreng untuk KDMP, Kementerian ESDM membuka peluang KDMP sebagai pangkalan LPG melalui skema teknis risiko rendah, sementara Kementerian Pertanian memastikan distribusi pupuk sudah diakomodasi dalam regulasi. Dukungan juga datang dari Kementerian PANRB yang menyiapkan tenaga P3K, baik penuh waktu maupun paruh waktu, untuk mendukung operasional. Kementerian Pemuda dan Olahraga berkomitmen melibatkan generasi muda berusia 17–22 tahun, khususnya dalam transformasi digital KDMP, dan Kementerian Komunikasi dan Digitalisasi memperkuat jaringan internet desa serta telah menghasilkan lebih dari 1.500 publikasi positif tentang KDMP di media massa.

Menko Pangan menekankan agar seluruh kementerian dan lembaga bersikap proaktif, tidak saling menunggu, dan segera mengoperasikan KDMP. Pulau Jawa akan menjadi prioritas awal dengan target 5.000 unit di Jawa Tengah, 5.000 unit di Jawa Timur, dan 5.000 unit di Banten/Tangerang. "KDMP adalah program prioritas Presiden yang harus dituntaskan

bersama. Semua gerai harus segera terisi agar manfaatnya langsung dirasakan masyarakat," tegas Menko Pangan.

Langkah bersama ini diharapkan tidak hanya memperkuat distribusi pangan, tetapi juga menghadirkan harapan baru bagi desa-desa di seluruh Indonesia. Dengan bergerak serentak, manfaat KDMP dapat segera dirasakan.

Narahubung.

Kepala Biro Umum, Keuangan dan Komunikasi Devid.Y. Mohammad.
081288119482